

SEKITAR PERISTIWA (KOTA) JOGJA KEMBALI, 1949

Aan Ratmanto, Dyah Ayu Anggraheni Ikaningtyas

Prodi Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Adab dan Bahasa, UIN Raden Mas Said Surakarta;

Prodi Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Yogyakarta

aanratmanto@staff.uinsaid.ac.id, dyahayu@uny.ac.id

Abstrak

Artikel ini membahas tentang kerancuan dan bias pemaknaan peristiwa Jogja Kembali. Selama ini ada beberapa lapis bias pemaknaan narasi peristiwa Jogja Kembali, baik dalam ranah nasional maupun lokal. Bias pemaknaan ini kemudian menyebabkan pewarisan narasi peristiwa Jogja Kembali menjadi tidak utuh terutama mengenai hari peringatan Jogja Kembali. Metode yang digunakan adalah metode penelitian sejarah kritis berupa heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi dengan menggunakan dua sumber primer koleksi Museum Perjuangan Mandala Bhakti Kodam IV/Diponegoro berupa laporan Sri Sultan Hamengku Buwono IX dalam peristiwa Jogja Kembali. Hasil penelitian membuktikan bahwa peristiwa Jogja Kembali merupakan peristiwa penarikan tentara Belanda dari Daerah Istimewa Yogyakarta pada 24 Juni – 30 Juni 1949. Peristiwa ini kemudian ditandai dengan Proklamasi 30 Juni 1949 oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX.

Kata Kunci: Jogja Kembali, penarikan tentara Belanda, Sri Sultan Hamengku Buwono IX, Proklamasi 30 Juni 1949.

Abstract

This article discusses the confusion and bias in the interpretation of the Jogja Kembali event. So far, there have been several layers of bias in the interpretation of the narrative of the Jogja Kembali event, both in the national and local spheres. This bias in interpretation then causes the inheritance of the narrative of the Jogja Kembali event to be incomplete, especially regarding the commemoration day of Jogja Kembali. The method used is a critical historical research method in the form of heuristics, source criticism, interpretation, and historiography by using two primary sources from the collection of the Mandala Bhakti Museum of Struggle, Kodam IV/Diponegoro in the form of a report by Sri Sultan Hamenku Buwono IX in the Jogja Kembali event. The results of the research prove that the Jogja Kembali event was the event of the withdrawal of Dutch troops from the Special Region of Yogyakarta on June 24 – June 30, 1949. This event was then marked by the Proclamation of June 30, 1949 by Sri Sultan Hamengku Buwono IX.

Keywords: Jogja Kembali; withdrawal of Dutch troops, Sri Sultan Hamengku Buwono IX, Proclamation of June 30, 1949.

PENDAHULUAN

Setidaknya ada dua peristiwa besar yang terjadi di Yogyakarta pasca Agresi Militer Belanda II. Peristiwa pertama adalah Serangan Umum 1 Maret 1949, sedangkan yang kedua adalah peristiwa Jogja Kembali. Peristiwa pertama sudah banyak dibahas dan telah menjadi polemik yang berkepanjangan bahkan hingga sekarang, terutama mengenai siapa yang menjadi ‘aktor intelektual’ atau pencetus ide Serangan Umum 1 Maret 1949. Sementara itu, peristiwa Jogja Kembali seolah-olah tenggelam dan kalah pamor dengan peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949. Padahal, keduanya ibarat *start* dan *finish*, di mana Jogja Kembali adalah tujuan utama dari Serangan Umum 1 Maret 1949, yakni mengusir tentara Belanda dari Republik Indonesia atau setidaknya dari ibukota Yogyakarta (Ratmanto 2018: 1).

Jogja Kembali memang masih ‘absen’ dalam historiografi Indonesia, ini terbukti dengan belum adanya karya-karya yang secara khusus membahas periode tersebut. Peristiwa ini masih luput dari amatan para sejarawan, baik dari sejarawan Indonesia maupun sejarawan asing, terutama Belanda. Bagi sejarawan Indonesia sendiri, tentu ini menjadi hal yang ironis, sebab Jogja Kembali adalah sejarah ‘kemenangan’ bagi bangsanya—dan biasanya sejarah semacam ini selalu ramai menjadi topik historiografi. Sebaliknya, bagi sejarawan Belanda, Jogja Kembali adalah sebuah sejarah kelam, dan kekalahan yang “memalukan” bagi negaranya. Maka, tak heran jika tema tentang penarikan tentara Belanda dari daerah Republik dan pemulangannya jarang diminati. Agaknya hal ini bisa dimaklumi karena bagi Belanda, Jogja Kembali adalah “sejarah kekalahan” bagi mereka (Ratmanto 2018: 2).

Absennya Jogja Kembali dalam historiografi Indonesia membuat peristiwa ini dituturkan dan diwariskan dalam keadaan yang tidak utuh. Lebih dari enam dasawarsa, Jogja Kembali dinarasikan dengan makna tunggal, yakni masuknya TNI ke kota Yogyakarta pada 29 Juni 1949. Maka, setiap tanggal itu masyarakat Yogyakarta memperingatinya sebagai hari Jogja Kembali. Padahal peristiwa Jogja Kembali itu merupakan penggalan dari peristiwa Penarikan Tentara Kerajaan Belanda dari Daerah Istimewa Yogyakarta—ini berarti pula sebagai transfer kekuasaan sipil dan militer dari tangan Belanda kepada Republik Indonesia—yang berlangsung mulai 24 Juni 1949 – 30 Juni 1949. Dan di akhir proses penarikan itu, Sri Sultan Hamengku Buwono IX mengeluarkan ‘Proklamasi 30 Juni 1949’ sebagai penanda bahwa seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta—sebagai ibukota Republik—kembali merdeka, bebas dari pendudukan tentara Belanda (Ratmanto 2018: 2-3).

Narasi yang tak utuh ini kemudian dilembagakan dan diwariskan lewat Monumen Jogja Kembali (Monjali). Hingga sekarang, di Monjali, rekonstruksi peristiwa Jogja Kembali hanya terwakili oleh sebuah diorama, yakni mengenai masuknya TNI ke kota Yogyakarta pada 29

Juni 1949—sebagian kecil dari keseluruhan proses penarikan tentara Belanda dari seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta. Di sana, tidak ada diorama proses penarikan tentara Belanda pada 24 Juni – 30 Juni 1949 dari pelbagai wilayah di seluruh Karesidenan Yogyakarta. Kondisi ini pun terjadi di museum-museum lainnya di Yogyakarta, seperti: Museum Monumen Benteng Vredenburg; Museum Perjuangan; dan Museum TNI AD Dharma Wiratama (Ratmanto 2018: 3).

Sebenarnya, peristiwa Jogja Kembali mempunyai “nama besar” dan sering disebut dalam sejarah Indonesia. Namun, pengertiannya masih kabur. Malahan, bagi sebagian besar masyarakat Yogyakarta, Jogja Kembali selalu diidentikkan dengan Monjali. Sebagian yang lain, terutama orang luar Yogyakarta memandang peristiwa ini sebagai peristiwa kembalinya Presiden Soekarno dan para pimpinan Republik lainnya ke Yogyakarta pada 6 – 13 Juli 1949. Pengertian ini bisa kita lihat antara lain dari tulisan Mestika Zed berikut ini.

Pada gilirannya, kemenangan politik perundingan RI memulihkan kembali kekuasaannya yang didongkel Belanda dari ibu kota Yogyakarta pada akhir 1948 dan setelah terombang-ambing dalam perjuangan gerilya, dan setelah melewati perjuangan di meja perundingan “Yogya Kembali” ke pangkuan RI pada pertengahan Juli 1949 (Mestika Zed, 2012: 483).

Pengertian tersebut akan sangat berbeda jika merujuk pada sumber-sumber sezaman. Misalkan melalui berita di harian *Kedaulatan Rakjat* edisi 30 Juni 1950. Pada edisi ini, *Kedaulatan Rakjat* memuat berita atau ingatan mengenai peringatan peristiwa Jogja Kembali dengan kepala berita bertajuk “30 Juni Setahun Jang Lalu Daerah Jogja Kembali Merdeka.” (*Kedaulatan Rakjat*, 30 Juni 1950). Sumber lain bisa dirujuk pada arsip Proklamasi 30 Juni 1949 koleksi Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Yogyakarta. Proklamasi yang dikeluarkan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX ini menandai berakhirnya penarikan tentara Belanda dari seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta yang berbunyi, “Pada hari Kamis tanggal 30 Juni 1949 kekuasaan Pemerintahan di seluruh Daerah Istimewa Jogjakarta kembali di tangan Pemerintah Republik Indonesia yang berkedudukan lagi di Ibu Kota Jogjakarta” (DPAD, Senarai Arsip Multi Subyek No. 377). Naskah proklamasi ini juga dimuat di harian *Kedaulatan Rakjat* edisi 30 Juni 1949. Sehari kemudian, harian Nasional pun menurunkan berita yang sama persis, baik isi maupun tata letaknya (Ratmanto 2018: 4-5)

Namun, selama ini penekanan peristiwa Jogja Kembali hanya dinarasikan dan berhenti pada tanggal 29 Juni 1949, yakni masuknya Tentara Nasional Indonesia (TNI) ke kota Yogyakarta. Maka, setiap tanggal itu sebagian besar masyarakat Yogyakarta memperingatinya sebagai hari Jogja Kembali. Permasalahan utama mengenai peristiwa Jogja Kembali adalah

narasinya yang tidak utuh. Mengapa tanggal 29 Juni yang kemudian dianggap sebagai hari Jogja Kembali? Kenapa bukan tanggal 30 Juni? Di mana, tanggal 30 Juni 1949 adalah hari terakhir peristiwa penarikan tentara Belanda dari Daerah Istimewa Yogyakarta yang ditandai dengan proklamasi oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Berdasarkan permasalahan tersebut, kajian ini bertujuan untuk merekonstruksi secara utuh peristiwa Jogja Kembali yang selama ini masih bias pengertiannya.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah kritis, berupa: pemilihan topik; heuristik; kritik sumber; interpretasi; dan historiografi (Kuntowijoyo, 2018: 69). Sumber utama yang digunakan dalam penelitian adalah dua bundel arsip koleksi Museum Mandala Bhakti Kodam IV Diponegoro, Semarang. Bundel pertama bertajuk "*Laporan Singkat Tentang Pekerdjaan Ketua Sub-Committee I Delegasi RI Merangkap Menteri Negara Koordinator Keamanan tahun 1949*" dan yang kedua bertajuk "*Laporan Penarikan Tentara Keradjaan Belanda dari Daerah Istimewa Jogjakarta dan Pergantiannya oleh Tentara Nasional Indonesia.*" Kedua bundel arsip ini merupakan laporan pertanggungjawaban Sri Sultan Hamengku Buwono IX kepada Presiden Soekarno atas mandat *Plein Pouvoir* 1 Mei 1949 yang telah ia terima terkait pengembalian pemerintahan Republik di Yogyakarta. Laporan ini dibuat pada 17 Juli 1949, setelah peristiwa Jogja Kembali.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sri Sultan Hamengku Buwono IX Menerima Mandat Plein Pouvoir

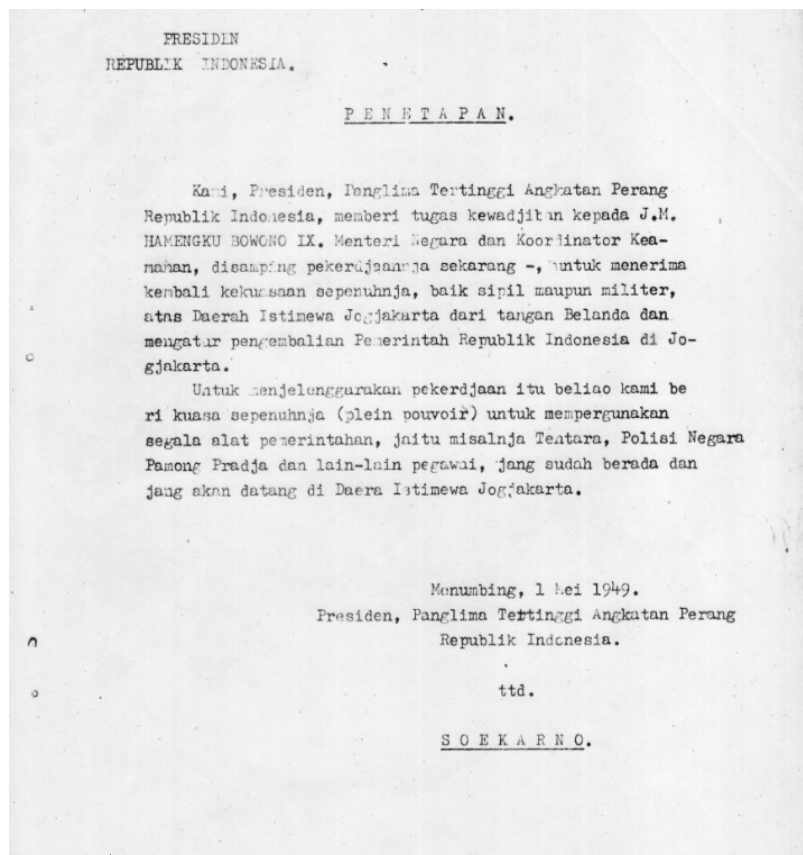
Setelah Serangan Umum 1 Maret 1949, akhirnya Republik Indonesia (RI) dan Belanda kembali ke meja perundingan pada 14 April 1949. Perundingan ini dipimpin oleh Mark Cochran (Amerika Serikat) di Hotel Des-Indies, Jakarta. Delegasi Belanda dipimpin oleh Dr. J.H. Van Royen, beranggotakan Mr. N.S. Blom, Mr. A.S. Jacob, Dr. J. Van Dervelde beserta empat orang penasihat. Sedangkan pihak RI dipimpin oleh Mr. Muhammad Roem dan wakilnya Mr. Ali Sastroamidjojo, beranggotakan Dr. Leimena, Ir. Juanda, Prof. Dr. Soepomo, Mr. Latuharhary beserta lima orang penasihat (Sumiyati 2001: 134).

Perundingan ini kemudian lebih dikenal dengan nama Persetujuan Roem-Royen, yang ditandatangani pada 7 Mei 1949. Bagi Mohamad Roem sendiri, begitu pula dengan van Royen dan UNCI, menganggap ini sebagai "Royen-Roem Statements" yang secara teknis bukan merupakan persetujuan atau perjanjian. Ia merupakan suatu pernyataan bersama. Van Royen

mengeluarkan sebuah keterangan tentang apa yang akan dikerjakan oleh pemerintah Belanda, begitu pula Mohammad Roem pun mengeluarkan suatu keterangan tentang kebijakan yang akan dikeluarkan oleh Soekarno-Hatta, berupa jaminan secara pribadi bahwa akan segera diadakan gencatan senjata setelah pemerintah Republik kembali ke Yogyakarta (Roem 1972: 53).

Beberapa hari sebelum persetujuan Roem-Royen ditandatangani, pada 1 Mei 1949, Presiden Soekarno yang sedang berada di Menumbing, melalui Surat Penetapan Presiden memberikan kekuasaan penuh '*Plein Pouvoir*' kepada Menteri Negara Koordinator Keamanan, Sri Sultan Hamengku Buwono IX untuk menerima kembali kekuasaan sepenuhnya, baik sipil maupun militer atas Daerah Istimewa Yogyakarta dari tangan Belanda dan mengatur pengembalian pemerintah RI di Yogyakarta. Dengan penetapan itu, Sultan diberi kuasa penuh untuk mempergunakan segala alat pemerintahan, seperti tentara, polisi negara, pamong praja, dan pegawai-pegawai RI lainnya (Penetapan Presiden Republik Indonesia, Menumbing, 1 Mei 1949).

Gambar 1. Surat Penetapan Presiden Republik Indonesia, Menumbing, 1 Mei 1949



Sumber: Museum Mandala Bhakti Kodam IV/Diponegoro. Penetapan Presiden Republik Indonesia, Menumbing, 1 Mei 1949.

Pada 13 Mei 1949, pihak RI dan Belanda menyepakati adanya “*suspension of arm*” yang tertuang dalam *progress-report* Sub-Committee I. Di dalam kesepakatan itu diterangkan bahwa “*It is obvious that suspension of arm has to precede the transfer of authority*” (Laporan Menteri Negara Koordinator Keamanan, 1949: 1). Kedua belah pihak kemudian menyetujui beberapa kesepakatan sebelum dilaksanakannya Penarikan Tentara Kerajaan Belanda dari Daerah Istimewa Yogyakarta, antara lain berisi kesepakatan seperti berikut.

Pertama, pihak Indonesia dan Belanda akan segera mengeluarkan perintah kepada kesatuan-kesatuan bersenjata di Daerah Istimewa Yogyakarta, polisi, dan organisasi-organisasi lainnya yang bersenjata supaya menghindari pertempuran dan segera menghentikan perbuatan sabotase, perusakan, perintangan, memasang *mijn* dan aksi-aksi rahasia. Kedua, pada suatu tanggal yang akan ditentukan dan sesudah dikeluarkan perintah tersebut sub bab I di atas, maka “*suspension of arm*” akan diumumkan secara resmi. Detail-detail lanjutannya akan ditentukan lagi dan akan merupakan persetujuan tersendiri. Ketiga, jikalau tanggal dan waktu penarikan Tentara Kerajaan Belanda dari daerah-daerah, tempat-tempat atau pos-pos sudah dapat ditentukan, maka Delegasi Belanda akan memberi tahu hal itu kepada wakil republik 2 x 24 jam sebelumnya, supaya pihak Republik mendapat kesempatan menduduki dengan segera daerah-daerah yang ditinggalkan oleh tentara Belanda. Keempat, tentara Belanda dan TNI dilarang keras untuk mengadakan perhubungan langsung satu sama lainnya. Jikalau perhubungan itu perlu sekali, maka hal itu harus dilakukan dengan perantaraan komisi-komisi yang bersangkutan atau dengan perantaraan peninjau-peninjau militer UNCI. Kelima, pihak Indonesia dan Belanda menyetujui bahwa para peninjau UNCI akan diminta supaya mengawasi terlaksananya kesepakatan tersebut (Laporan Menteri Negara Koordinator Keamanan, 1949: 2).

B. Jadwal Penarikan Tentara Belanda dari Daerah Istimewa Yogyakarta

Sebagai perwujudan dari kesepakatan-kesepakatan tersebut, pada 10 Mei 1949, Kolonel Van Langen—komandan Tijger Brigade—memerintahkan kepada seluruh pasukannya yang berada di Keresidenan Yogyakarta supaya menghindari pertempuran dengan pasukan-pasukan Republik. Hal serupa juga dilakukan oleh pihak Republik pada 16 Mei 1949, Menteri Negara Koordinator Keamanan, Sri Sultan Hamengku Buwono IX memerintahkan kepada TNI untuk menghindari pertempuran-pertempuran dengan tentara Belanda. Selanjutnya, pada 23 Mei 1949, Sri Sultan Hamengku Buwono IX kembali mengeluarkan jaminan tertulis kepada

Kolonel Van Langen; jaminan bahwa TNI tidak akan melakukan gangguan terhadap tentara Belanda pada saat pelaksanaan penarikan pasukan dari Daerah Istimewa Yogyakarta (Laporan Menteri Negara Koordinator Keamanan, 1949: 2).

Pada 22 Juni 1949 di Jakarta, Ketua Sub-Committee I Delegasi Indonesia mengadakan pertemuan dengan ketua Delegasi Belanda. Dalam pertemuan tersebut diperoleh kesepakatan, bahwa dalam penarikan tentara Belanda dari Yogyakarta dilakukan tidak dengan “*suspension of arm*,” karena kedua belah pihak telah memerintahkan kepada pasukannya masing-masing untuk saling menghindarkan pertempuran. Dalam pertemuan tersebut, pihak Belanda juga menyampaikan kepada RI, bahwa tentara Belanda akan ditarik dari Daerah Istimewa Yogyakarta mulai 24 Juni 1949. Kemudian, pada 23 Juni 1949, *Milex-board* menyampaikan ‘Rencana Penarikan Tentara Kerajaan Belanda dari Daerah Istimewa Yogyakarta’ beserta jadwalnya kepada Ketua Sub-Committee I Delegasi RI (Laporan Menteri Negara Koordinator Keamanan, 1949: 2-3).

Pada hari yang sama, Menteri Negara Koordinator Keamanan kembali memerintahkan kepada TNI supaya menghindarkan pertempuran dengan tentara Belanda. Adapun jadwal Penarikan Tentara Kerajaan Belanda dari Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagai berikut. Pada 24 Juni 1949, penarikan diawali dari Pos Bunder dan Pos Gading (Gunungkidul). Pada 25 Juni 1949, Pos Bunder, Pos Piyungan, dan Pos Prambanan. Pada 26 Juni 1949, Pos Kedaton Plered, Pos Klangon, dan Pos Bantul. Pada 27 Juni 1949, Pos Gamping, Pos Padokan, dan Pos Kotagede. Pada 28 Juni 1949, Pos Kalasan, Pos Tanjungtirto, Pos Kaliurang, Pos Maguwo, dan Pos Wonocatur. Pada 29 Juni 1949, Kota Yogyakarta. Dan terakhir pada 30 Juni 1949, Pos Nganti, Pos Beran, Pos Cebongan, Pos Sleman, dan Pos Medari (Laporan Menteri Negara Koordinator Keamanan 1949: 3).

Dalam proses Penarikan Tentara Kerajaan Belanda dari Daerah Istimewa Yogyakarta telah disepakati oleh kedua pihak untuk menyerahkan urusan teknis pelaksanaannya kepada beberapa tim pengawas yang terdiri dari, *Military Observers (Milobs-team)*, *Liaison Officers (LO)*, serta perwakilan dari pihak Belanda. *Military Observers* atau sering disebut *Milobs-teams* adalah pengawas-pengawas militer dari pihak UNCI. Satu *Milobs-teams* terdiri dari dua orang peninjau militer. Sedangkan *Liaison Officers* adalah para pengawas yang berasal dari pihak RI. Dalam setiap pelaksanaan penarikan Tentara Kerajaan Belanda, biasanya beranggotakan 2 orang hingga 4 orang. Tim pengawas yang terakhir adalah perwakilan dari pihak Tentara Kerajaan Belanda. Namun, dalam pelaksanaannya, tim pengawas ini tidak begitu menonjol perannya. Mereka sering tidak menyertakan tim pengawasnya (Ratmanto 2018: 185).

C. Penarikan Tentara Belanda dari Daerah Istimewa Yogyakarta

Pada umumnya, cara penarikan tentara Belanda dari pos-posnya dilakukan seperti berikut; dua *Milobs-teams* bersama-sama dengan *Liaison Officers* Republik datang ke pos Belanda. Kemudian beberapa orang *Liaison Officers* pergi ke tempat persiapan pasukan-pasukan Kepolisian, Pamong Praja, dan TNI yang telah bersiap untuk menduduki pos-pos yang akan ditinggalkan Belanda. Apabila pasukan-pasukan tersebut telah siap, maka *Liaison Officers* kembali lagi untuk memberi tanda atau laporan kepada *Milobs-teams*, kemudian diteruskan ke Komandan T-Brigade. Selanjutnya, tentara Belanda mulai ditarik dari pos tersebut (pada umumnya berjalan kaki, sedangkan barang-barangnya diangkut dengan kendaraan bermotor, misal truk), dengan diikuti salah satu *Milobs-teams* yang ditugaskan pada pihak Belanda. Sedangkan *Milobs-teams* lainnya bersama *Liaison Officers* tetap tinggal di tempat tersebut untuk memberi tanda kepada pasukan-pasukan RI yang akan mengambil alih pos tersebut, apabila konvoi tentara Belanda telah dirasa cukup jauh meninggalkan posnya. Jika tanda telah diberikan, maka rombongan dari pihak RI segera masuk dalam pos itu. Pasukan-pasukan tersebut segera memeriksa keadaan tempat yang akan diduduki, dan jika dirasa aman, maka mereka segera mendirikan markas. Di pos yang baru diduduki tersebut, pihak RI mengadakan upacara sederhana, mengibarkan bendera Sang Merah Putih diiringi lagu Indonesia Raya yang disaksikan *Milobs-teams* dan *Liaison Officers*. Setelah upacara sederhana itu, *Milobs-teams* dan *Liaison Officers* lalu meninggalkan pos tersebut untuk kembali ke kota Yogyakarta (Laporan Menteri Negara Koordinator Keamanan 1949: 3).

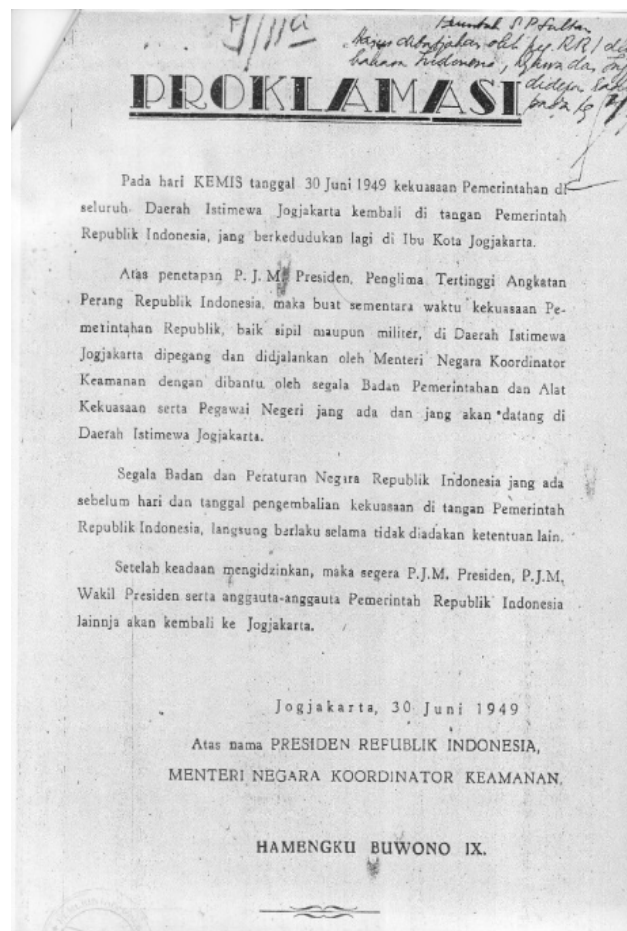
Sementara itu, sebelum tentara Belanda ditarik dari suatu pos, maka kurang lebih 12 jam sebelumnya TNI, Polisi dan Pamong Praja telah siap disuatu tempat dekat pos tersebut, tempat di mana sebelumnya sudah diberi tahukan kepada Komandan T-Brigade dengan perantaraan *Milobs-teams*. Dalam urusan pergantian pendudukan suatu pos oleh Tentara Kerajaan Belanda, *Milobs-teams* selalu memberi perantaraan dengan berpedoman pada “*Special Instructions to Military Observers Operating within the Residency of Jogjakarta before and after the Withdrawal of Netherlands Forces*” tertanggal 23 Juni 1949 (Laporan Menteri Negara Koordinator Keamanan 1949: 3).

Menurut laporan Menteri Negara Koordinator Keamanan, dari 24 pos yang berada di luar kota Yogyakarta yang ditinggalkan oleh tentara Belanda, hanya 13 pos yang seketika diduduki oleh pasukan-pasukan Republik. Sedangkan pos-pos lainnya tidak diduduki dengan seketika, karena pos-pos tersebut dianggap tidak terlalu penting ditinjau dari segi keamanannya. Secara umum dari laporan Sri Sultan Hamengku Buwono IX proses Penarikan Tentara Kerajaan

Belanda dari Daerah Istimewa Yogyakarta berjalan lancar (Laporan Menteri Negara Koordinator Keamanan, 1949: 3). Momentum ini kemudian disempurnakan dengan keluarnya Proklamasi 30 Juni 1949, yang berbunyi.

Pada hari Kamis tanggal 30 Juni 1949 kekuasaan Pemerintah di seluruh Daerah Istimewa Jogjakarta kembali di tangan Pemerintah Republik Indonesia, yang berkedudukan lagi di Ibu Kota Jogjakarta. Atas penetapan P.J.M. Presiden, Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia, maka buat sementara waktu kekuasaan Pemerintah Republik, baik sipil maupun militer, di Daerah Istimewa Jogjakarta dipegang dan dijalankan oleh Menteri Negara Koordinator Keamanan dengan dibantu oleh segala Badan Pemerintahan dan Alat Kekuasaan serta Pegawai Negeri yang ada dan yang akan datang di Daerah Istimewa Jogjakarta. Segala Badan dan Peraturan Negara Republik Indonesia yang ada sebelum hari tanggal pengembalian kekuasaan di tangan Pemerintah Republik Indonesia, langsung berlaku selama tidak diadakan ketentuan lain. Setelah keadaan mengizinkan, maka segera P.J.M. Presiden, P.J.M. Wakil Presiden serta anggota-anggota Pemerintah Republik Indonesia lainnya kembali ke Jogjakarta (DPAD, Senarai Arsip Multi Subyek No. 377).

Gambar 2. Proklamasi 30 Juni 1949



Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Yogyakarta, Senarai Arsip Multi Subyek No. 377.

KESIMPULAN

Peristiwa Jogja Kembali yang selama ini diperingati setiap tanggal 29 Juni, agaknya berdasar pada proses penarikan tentara Belanda dari Kota Yogyakarta dan masuknya TNI ke kota Yogyakarta pada 29 Juni 1949. Dari sini, maka diperoleh kesimpulan bahwa Jogja Kembali yang selama ini diperingati setiap 29 Juni ruang lingkupnya adalah ‘Kota Yogyakarta’. Tanggal 29 Juni adalah “Kota Jogja Kembali.” Kemungkinan besar, penetapan ini merupakan ‘generalisasi’ kota Yogyakarta sebagai ibukota Daerah Istimewa Yogyakarta, sekaligus ibukota Republik Indonesia, di mana semua kegiatan perpolitikan kala itu berpusat di sana.

Jadi, tanggal 29 Juni itu adalah peristiwa penarikan dari “Kota Yogyakarta” saja, belum mencakup keseluruhan Daerah Istimewa Yogyakarta. Peringatan tanggal 29 Juni sejatinya adalah peringatan peristiwa “Kota Jogja Kembali” dan bukan “Jogja Kembali” dalam konsep Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini berarti pula mengabaikan Proklamasi 30 Juni 1949. Sebab, proklamasi yang dikeluarkan oleh Sultan Hamengku Buwono IX itu adalah penanda bahwa kekuasaan pemerintah di seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta kembali di tangan pemerintah Republik Indonesia yang berkedudukan lagi di ibu kota Yogyakarta. Meskipun bukan sebuah proklamasi kemerdekaan yang fenomenal seperti Proklamasi 17 Agustus 1945, namun Proklamasi 30 Juni 1949 memiliki maksud dan tujuan yang hampir serupa. Jika, Proklamasi 17 Agustus 1945, sebagai simbol bangsa Indonesia terbebas dari pendudukan Jepang, maka Proklamasi 30 Juni 1949 bisa diartikan bahwa bangsa Indonesia terbebas dari penjajahan Belanda. Terbukti, setelah peristiwa ini, segala alat negara bisa melaksanakan tugasnya kembali, terutama dalam kaitannya dengan proses diplomasi Indonesia yang kemudian mengantar pada Penyerahan Kedaulatan pada 27 Desember 1949.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 1950. “30 Juni Setahun Jang Lalu Daerah Jogja Kembali Merdeka”. *Kedaulatan Rakjat*, edisi 30 Juni 1950.
- Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY. *Senarai Arsip Multi Subyek No. 377*. *Kedaulatan Rakjat*, edisi 30 Juni 1949.
- Kuntowijoyo. 1995. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.

Museum Mandala Bhakti Kodam IV/Diponegoro. 1949. *Laporan Singkat Tentang Pekerdjaan Ketua Sub-Committee I Delegasi RI merangkap Menteri Negara Koordinator Keamanan tahun 1949.*

1949. Penetapan Presiden Republik Indonesia, Menumbing, 1 Mei 1949.

1949. *Laporan Menteri Negara Koordinator Keamanan Tentang Penarikan Tentara Keradjaan Belanda dari Daerah Istimewa Jogjakarta dan Pergantian Mereka Oleh Tentara Nasional Indonesia tahun 1949.*

Ratmanto, Aan. 2012. *Mengawal Transisi: Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Pemerintahan Transisi Republik Indonesia di Yogyakarta 1949.* Yogyakarta: Atap Buku dan Matapadi Pressindo.

2018. "Jogja Kembali: Transfer Kekuasaan Sipil dan Militer dari Belanda ke Indonesia, 1949." *Tesis.* Departemen Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada.

Roem, Moehammad. 1972. *Tiga Peristiwa Bersejarah: Konggres Nasional I, Lahirnja Pantjasila, Kembali ke Djokja.* PT. Sinar Hudaya.

Sumiyati, Sri Endang, dkk. 2001. *Penelusuran Sejarah Serangan Oemoem 1 Maret 1949.* Yogyakarta: Media Pressindo, 2001.

Zed, Mestika & Mukhlis Paeni. 2012. *Indonesia dalam Arus Sejarah (jilid 6), Perang dan Revolusi.* Jakarta: PT Ichtiar Baru van Houve dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.